

BUDAYA POLITIK NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG: SUATU PERBANDINGAN

Oleh :
Herning Suryo

Abstract

The political culture of a society reflect a pattern of behavior in the life of the state, but because of the political culture also may reflect a common value system of a society which has the awareness to participate in collective decision making and determination of public policy for the whole community.

From the comparison of the political culture in the developed and developing countries (United States, China and Indonesia), it has a distinctive political culture and identity as a feature of the country. Each country seeks to transform towards democratic politics by using a political culture that is rooted in the community, so that these countries achieve what is aspired to national interests.

In the context of this comparison, Indonesia can be said to approach the development of a democratic political culture of the United States and China. Indonesia has implemented democratic elections and has implemented presidential election through the national convention. Thus, Indonesia certainly has a relatively advanced political culture and want to learn at every stages toward democracy.

Keyword: comparison; democracy; state

Pendahuluan

Budaya politik selalu menjadi salah satu tema ilmu politik yang sangat menarik dan tidak pernah habis-habisnya untuk dikaji, bukan saja karena budaya politik merefleksikan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, namun karena budaya politik juga dapat mencerminkan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Dalam era globalisasi, budaya politik dalam suatu negara seringkali ambivalen dan cenderung mencair. Globalisasi juga mendorong masyarakat dunia lebih perhatian terhadap kultur masyarakat lainnya, maupun berbagai aspek perbedaan budaya.

Banyak ahli berpendapat bahwa kemajuan suatu negara ditentukan oleh sikap dan budaya rakyat atau warga negaranya yang terbiasa berperilaku demokratis, kritis dan partisipatif. Hal ini merupakan salah satu indikator determinasi di mana suatu negara dapat dikatakan negara demokratis. Perilaku demokratis merupakan pencerminan dari budaya politik nasional atau negara. Suatu masyarakat

membutuhkan budaya politik yang kuat agar dapat memajukan stabilitas negara.

Budaya politik mengacu pada keseluruhan pengetahuan, sikap emosional dan penilaian etika moral yang berkaitan dengan isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sikap dan tingkah laku inilah menjadi suatu objek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi di dalam sistem politik. Konsep budaya politik lazimnya dikaitkan dengan konsep negara atau budaya-budaya nasional. Dalam hal ini, budaya politik merupakan perwujudan kembali konsep lama yang disebut dengan karakter nasional yang berisi serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatarbelakangi suatu kondisi dimana terjadi peristiwa politik. Schirato & Yell mendefinisikan budaya sebagai '*both a knowledge of meaning systems and an ability to negotiate those systems within different cultural contexts*'. Pengertian '*meaning systems*' adalah *policies, contexts, discourses, ideas, ideologies, belief systems, traditions, narratives*. (David Birch, Tony Schirato and Sanjay Srivastava, *Asia: Cultural Politics in the Global Age*)

Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungan internal. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat

menjadi hal penting untuk mengukur kemajuan budaya politik yang sedang berkembang. Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik mencakup masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintahan, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Pemilihan umum (Pemilu) dan komunikasi politik merupakan salah satu parameter dalam melihat bagaimana budaya politik yang berjalan di suatu negara. Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif. Semua fungsi yang dijalankan oleh sistem politik tersebut pada dasarnya dilaksanakan melalui sarana komunikasi. Komunikasi politik menyambungkan antar semua bagian dari sistem politik, sehingga sistem politik itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya, komunikasi politik merupakan faktor pendukung dalam penentuan budaya politik suatu negara.

Selain itu, pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik seyogyanya merupakan bagian dari budaya politik karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa. Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai budaya politik negara maju dan negara berkembang termasuk budaya politik di Indonesia, sehingga akan terlihat perbedaan dan persamaan yang dilihat melalui perbandingan politik. Dalam penulisan ini, akan dikaji budaya politik di negara maju dan negara berkembang sehingga akan dapat dilihat perbandingan dari budaya politiknya.

Perbandingan Budaya Politik

Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik. Budaya politik lebih merupakan sifat atau karakter berpolitik yang berkembang dalam masyarakat dengan seperangkat objek dan

proses sosial yang bersifat khusus. Budaya politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, serta norma kebiasaan yang dihayati oleh sejumlah anggota masyarakat di dalam kehidupannya.

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik tersebut. Dengan kata lain, berbagai negara mempunyai pola keyakinan, nilai-nilai dan sikap politik yang sangat berbeda dan didalam negara-negara tersebut elemen-elemen budaya politik terbentuk oleh pengalaman hidup, pendidikan, dan kelas sosial.¹ Selain itu, mereka juga menyebutkan juga bahwa budaya politik sebagai keyakinan, sikap, nilai, ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara dan peran dari masing-masing individu. (Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*)

Almond dan Verba membagi orientasi budaya politik menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Orientasi Kognitif (*cognitive orientation*), merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya, termasuk pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Orientasi Afektif (*affective orientation*), merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para aktor dan penampilannya. Sebagai bentuk aplikasinya yaitu perasaan masyarakat untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.
3. Orientasi Evaluatif (*evaluation orientation*), merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki.

Dari ketiga tersebut di atas, terdapat kausalitas berlangsung dua arah yaitu sikap mempengaruhi struktur dan perilaku dan

struktur dan kinerja mempengaruhi sikap. Sehingga, budaya politik mempengaruhi struktur dan kinerja pemerintah. Dengan demikian, ketiga orientasi tersebut menunjukkan bahwa budaya politik cukup lentur dan dapat berubah secara dramatis sebagai respon terhadap kinerja rezim, pengalaman sejarah dan sosialisasi politik.

Di samping itu, Almond dan Verba juga mengidentifikasi tiga objek yang dituju dalam orientasi politik yaitu: (1) Peran atau struktur dari sebuah institusi politik; (2) Aktor, yaitu para pemegang jabatan dari sebuah institusi negara; dan (3) Produk, yaitu kebijakan, keputusan dan penguatan keputusan yang dibuat oleh para aktor di dalam negara.

Dimensi-dimensi yang menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat, yaitu: (1) Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya; (2) Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan; (3) Pemahaman masyarakat mengenai penguatan kebijakan; dan (4) Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Almond dan Verba juga mengklasifikasikan tipe-tipe kebudayaan yaitu:

1. Budaya Politik Parokial, yang memiliki ciri-ciri:
 - a. Frekuensi orientasi masyarakat terhadap dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali.
 - b. Tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusus.
 - c. Peran-peran pemimpin masyarakatnya sangat berperan baik dalam bidang politik, ekonomi dan keagamaan.
 - d. Partisipasi masyarakat sangat bergantung pada pemimpinnya.
2. Budaya Politik Subjek, yang memiliki ciri-ciri:
 - a. Frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau

pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

- b. Pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.
 - c. Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik.
3. Budaya Politik Partisipan, yang memiliki ciri-ciri:
 - a. Masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai penentu budaya politik.
 - b. Masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan.
 - c. Berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.
 - d. Masyarakat sudah ikut terlibat dalam sistem politik pemerintahan.

Gabriel Almond, Sidney Verba, Seymour Martin Lipset, Robert Dahl dan Alex Inkeles mengidentifikasi orientasi-orientasi dalam budaya politik diperlukan oleh pengembangan dan pemeliharaan demokrasi, untuk menanggulangi salah satu dilema sentral demokrasi, yaitu menyeimbangi perpecahan dan konflik dengan kebutuhan akan konsensus. (Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*.) Sementara Lucien Pye menyatakan bahwa gagasan tentang budaya politik adalah sikap-sikap, sentimen-sentimen dan kognisi-kognisi yang mengungkapkan dan mengatur perilaku politik dalam suatu masyarakat di mana pola-pola yang koheren saling menguatkan satu sama lain.

Larry Diamond menyatakan bahwa budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide, sentimen dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Sementara itu, Samuel Beer menyatakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat ditarik batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut: pertama, secara umum budaya politik dibagi atas budaya politik apatis, budaya politik mobilisasi dan budaya politik partisipatif. Kedua, bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual seperti tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non aktual seperti orientasi, sikap, nilai dan kepercayaan. Ketiga, hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Dan keempat, budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam jumlah besar atau masyarakat.

Budaya Politik di Amerika Serikat

Negara Amerika Serikat masyarakatnya cenderung menganut budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya ketimbang subyek, di Amerika Serikat individu mengerti bahwa mereka adalah warga negara yang punya sejumlah hak maupun kewajiban. Hak misalnya untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan di sisi lain kewajiban untuk, misalnya, membayar pajak. Dalam budaya politik partisipan, sering dan merasa bebas mendiskusikan masalah politik. Mereka merasa bahwa, hingga tingkatan tertentu, dapat mempengaruhi jalannya perpolitikan negara. Mereka pun merasa bebas dan mampu mendirikan organisasi politik baik untuk memprotes ataupun mendukung pemerintah. Jika tidak mendirikan organisasi politik, mereka pun banyak bergabung ke dalam organisasi sukarela baik bersifat politik maupun tidak. Saat mengikuti pemilu mereka cukup berbangga hati.

Amerika Serikat merupakan negara federal dengan sistem presidensial dan pola pemerintahan demokrasi konstitusional. Amerika Serikat Demokrasi Amerika Serikat merupakan demokrasi yang stabil (lebih baik) dari beberapa negara di dunia. Pemerintahan federal di Amerika Serikat merupakan persekutuan di mana negara pusat dan negara bagian berbagi kekuasaan dan setiap negara berhak mengatur sendiri pemerintahan negaranya. Di Amerika Serikat terdapat tiga cabang kekuasaan yang

otonom dan independen yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Di dalam legislatif terdapat dua badan yang sederajat yaitu Senat merupakan wakil dari negara bagian yang dipilih oleh negara bagian dengan masa jabatan selama 6 tahun, dan House of Representative (DPR) yang dipilih oleh rakyat secara langsung dengan masa jabatan 2 tahun. Kedua badan legislatif ini berkumpul dalam kongres dalam proses politik pemerintahan untuk menghasilkan keputusan dengan perhitungan mayoritas adalah 50% + 1 (2/3 dari kongres).

Dalam kekuasaan eksekutif, presiden mempunyai hak otonom dan independen yang kuat sama seperti legislatif dalam proses pembuatan keputusan yang tidak dapat diganggu gugat. Dan di yudikatif, negara federal mengharuskan konstitusi dalam melindungi hak-hak negara bagian. Konstitusi Amerika Serikat menetapkan amandemen dapat disahkan dengan dukungan $\frac{3}{4}$ dari semua legislatif negara bagian serta 2/3 kongres Amerika Serikat.

Budaya politik di Amerika Serikat masyarakatnya memiliki kecenderungan menganut budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya ketimbang budaya politik subjek. Di Amerika Serikat, setiap individu mengerti bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai sejumlah hak dan kewajiban. Di samping itu, individu-individu tersebut dapat mempengaruhi jalannya perpolitikan negara.

Dalam sejarah politik di Amerika Serikat, sistem pemilihan *Simple-Plurality* (SP) dari distrik yang tunggal terlihat lebih menonjol tetapi tidak ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, terdapat tahapan sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat yaitu:

1. Nominasi.

Nominasi adalah dukungan resmi partai politik kepada calon presiden. Terdapat dua model nominasi yaitu pertama, sistem Caucus yang memberi legitimasi bagi elit-elit partai dan kedua, *Primary Election* merupakan tahapan melalui pemilihan *primary*.

2. Konvensi Nasional.

Konvensi nasional merupakan tahapan akhir dari penentuan calon presiden dari partai. Pemenang dari konvensi ini adalah pemenang mutlak sebagai presiden.

3. Pemilihan Nasional.

Dalam pemilihan ini, terdapat dua tahapan yaitu pertama, dilakukan oleh rakyat Amerika Serikat secara langsung untuk mendapatkan suara populasi dan kedua, pemilihan presiden oleh para pemilih.

Dalam konteks budaya politik di Amerika Serikat, dapat dikatakan budaya politik demokratis di mana budaya politik telah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Di samping itu, masyarakat Amerika Serikat diarahkan untuk berperan aktif dalam proses politik yang berlangsung dan hal ini sebagai perwujudan budaya politik partisipan. Dari implementasi dan pencerminan budaya politik di Amerika Serikat sejalan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba di mana partisipasi politik warga negaranya menjadi indikator penting untuk mewujudkan budaya politik yang demokratis.

Budaya Politik di China (Tionghoa)

China (Tionghoa) berdasarkan Kepress nomor 12/2014 tentang penggantian istilah China menjadi Tionghoa atau Tiongkok merupakan negara Asia Timur yang memiliki pertumbuhan yang paling signifikan selama 30 tahun terakhir, baik dalam sektor ekonomi maupun politiknya. Pertumbuhan dan perubahan yang terjadi di Tionghoa tersebut tidak lepas dari dinamika kebijakan domestik yang diambil oleh pemerintah Tionghoa . Keberhasilan pemerintah Tionghoa memilih kebijakan ekonomi dan politik bagi negerinya mengantarkan tumbuh Tionghoa sebagai salah satu macan Asia dan negara yang paling berpengaruh di dunia. *Review* ini akan membahas mengenai dinamika ekonomi dan politik domestik Tionghoa dan bagaimana dinamika tersebut berhasil membuat China(Tionghoa) menjadi salah satu negara terkuat di Asia dan dunia.

China (Tionghoa) saat ini merupakan negara sosialis-leninis yang pada awalnya berbentuk Autoritarian. Budaya politik Tionghoa mengalami perkembangan dari yang awalnya berupa Autoritarian menjadi

Anarki hingga kemudian menjadi Totalitarian. Budaya politik autoritarian dimu Tionghoa lai ketika awalnya daratan Tionghoa dikuasai oleh sebuah kekaisaran dimana terdapat kerajaan yang menguasai sebuah dinasti yang mempunyai kekuatan dan legitimasi yang besar dikarenakan ia dianggap sebagai “*Son of Heaven*”. Taoisme menjadi paham utama dalam kehidupan di Tionghoa saat itu, dimana pemujaan terhadap kerajaan adalah sebuah tradisi yang selalu dilakukan. Terdapat total 24 dinasti pada masa autoritarian , sebelum Tionghoa gempa dahsyat kemudian menghancurkan Beijing pada tahun 1976 dan membuat kematian Mao Zhedong menjadi tanda berakhirnya masa authoritarianisme-empire Tionghoa

Selanjutnya, Confucianisme lahir menjadi sebuah filosofi yang mempengaruhi budaya politik . Sistem imperealisme diterapkan dan penguasa baru dipilih berdasarkan seleksi masyarakat atas beberapa kriteria seperti kompetensi, merit, dan profesionalisme. Kandidat pemimpin imperial ini kemudian dipilih berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya atas ajaran Confucius. Hanya kandidat yang lolos *provincial examination* saja yang dapat menjabat sebagai pejabat pemerintah terendah. Confucianism sebagai ideologi negara pada masa itu dianggap lebih berpengaruh terhadap kebijakan politik karen Tionghoa a Confucianism dapat disebut juga sebagai authoritarianism. Keduanya sama-sama mementingkan legitimasi benar dan salah daripada anggapan mengenai ‘*mandate of heaven*’ seperti yang dipergunakan oleh pemerintah pada masa sebelumnya. Pada masa ini juga menjalin hubungan dengan orang asing (*westerners*) namun dengan cara mengisolasi keberadaan mereka diwilayah pelabuhan.

Modernisasi pertama kali diterapkan di Tionghoa pada masa pemimpin partai Nasionalis, Chiang Kai-Shek menjadi pemimpin Tionghoa pada tahun 1927-1937. Tionghoa mulai menggunakan politik komunisme semenjak tahun 1949, sistem politik Tionghoa ini terpengaruh dari ajaran Marxisme dan Leninisme yang berbasiskan pada paham sosialis. Hal ini membuat pemerintahan Tionghoa terpusat dan dipimpin oleh satu partai politik nasional yakni Partai Komunis Tionghoa yang merupakan partai tunggal dan amat

berpengaruh terhadap kehidupan perpolitikan Tionghoa . Partai Komunis Tionghoa menjalankan pemerintahan Tionghoa dengan Presiden yang diangkat dari partai. Presiden memiliki legitimasi yang tinggi dalam memimpin negara dan kebijakan luar negerinya, disamping partai dan institusi kenegaraan.

Daerah SAR dikenal juga dengan daerah pembangunan ekonomi Tionghoa , dimana zona ekonomi khusus merupakan salah satu strategi pembangunan Tionghoa di bidang ekonomi. Penerapan sistem ini dimulai ketika Deng Xiaoping yang mengumumkan reformasi dan keterbukaan akan investasi asing (*gaige kaifang*) pada tahun 1970-an, berbeda dengan strategi ekonomi Tionghoa yang sebelumnya mengikuti model substitusi impor yang bersifat protektif dan menarik diri dari ekonomi global. Zona ekonomi khusus ini memberikan perlakuan khusus bagi investor asing seperti pembebasan kewajiban pajak, peniadaan dan pengurangan hambatan tarif sehingga negara dapat berintegrasi dengan perekonomian global.

Pengembangan zona ekonomi khusus merupakan salah satu kunci pendorong keberhasilan pembangunan di Tionghoa . Pengembangan ZEK sendiri melibatkan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang memiliki peranan berkontak dengan pihak asing yang membuka investasi asing di daerah tersebut. Pengembangan ZEK sendiri pertamakali diusulkan oleh pemerintah provinsi Guangdong. Pada awalnya status ZEK hanya diberikan ke beberapa wilayah atau daerah khusus seperti Guangdong dan Fujian, namun saat ini ZEK Tionghoa telah berkembang ke banyak daerah dan hampir seluruh daerah Tionghoa kini merupakan ZEK dan terbuka dengan investasi asing.

Pembentukan ZEK sendiri memiliki sejarah yang unik, hal ini dikarenakan Tionghoa memiliki hubungan antara pusat dan daerah yang berbeda dengan negara komunis lainnya, berbeda dengan komunisme Lenin pada masa itu, komunisme Tionghoa lebih flexibel dan bahkan dalam pemerintahan Mao Zedong, Tionghoa ditengarai pernah mengalami gelombang desentralisasi sebanyak 2 kali. Walaupun Tionghoa memiliki sistem kontrol birokrasi terpusat ala sosialis, namun

pemerintah Tionghoa memberikan kebebasan pada daerahnya untuk menentukan kontrol sosial dan investasi terhadap asing, walaupun tetap dibawah kontrol pusat. Hal ini berarti apabila pusat tidak menghendaki sebuah kebijakan daerah maka daerah tersebut wajib untuk mematuhi aturan pusat.

Hubungan pusat daerah di Tionghoa adalah kunci dari pembangunan ekonomi Tionghoa , dimana pada tahun 1949-1978 Mao Zedong mengumumkan 2 kali gelombang desentralisasi yakni pada masa kampanye Lompatan Jauh Kedepan (1945-1957) dan Kampanye Revolusi Kebudayaan (1966-1976). Dalam kampanye ini Mao mengkritik pemerintah Uni Soviet yang terlalu membelenggu daerahnya sehingga daerah tidak dapat berkembang. Pada masa pasca tahun 1978, perkembangan pusat-daerah di Tionghoa menjadi semakin dinamis dengan mekanisme pasar untuk menjalankan proses produksi. Peran pemerintah pusat dalam mengatur industri daerah dikurangi meskipun kontrol pemerintah pusat akan daerah tetap absolut, seperti Benzinki dan Huntington yang menyebutkan kewenangan daerah ini sebagai 'pinjaman pusat' yang dapat dikembalikan sewaktu-waktu.

Adaptasi lokal merupakan hal yang penting, dan pemerintah Tionghoa membanggunya secara gradual dan bertahap. Awalnya dari beberapa provinsi hingga kemudian menyebar ke hampir seluruh daerah di Tionghoa , awalnya hanya provinsi yang mendapatkan desentralisasi dalam pengaturan fiskal, keputusan investasi, dan hubungan ekonomi luar negeri, namun gelombang desentralisasi berkembang hingga tingkat kota. Beijing, Tianjin dan Shanghai adalah 3 kota penyumbang terbesar untuk pusat. Pusat sendiri mendapatkan 42% dari pendapatan ZEK dan jumlahnya ditetapkan selama 4 tahun menurut Konferensi Kerja (Guongzuo Huiyi). Perubahan akhir terjadi pada 1992 dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping, dimana Deng merasakan perlunya pengembangan liberalisasi ekonomi yang lebih luas, pusat kemudian melebarkan arus desentralisasi hingga perfektur dan kabupaten, sehingga modernisasi industri dapat masuk kedalam seluruh bagian Tionghoa walaupun pada dasarnya

Tionghoa tetap merupakan negara sosialis-komunis.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan Tionghoa terjadi dengan sangat dinamis dan gradual, baik dalam sektor ekonomi maupun politiknya. Tionghoa sendiri masih merupakan negara komunis-sosialis, namun tidak seperti negara komunis lainnya, Tionghoa masih terbuka dan lebih fleksibel dalam menjalankan negaranya. Komunisme dilihat dari peran totalitarian pusat Tionghoa yang masih mendominasi dan absolut, namun daerah ZEK dan SAR memiliki kesempatan akan otonomi yang diberikan dibawah totalitarianisme Tionghoa. Hal inilah yang kemudian membangun dan merubah Tionghoa menjadi negara yang maju dengan tingkat ekonomi yang sangat tinggi. Menurut pendapat penulis, keadaan perekonomian Tionghoa merupakan hal yang unik dan menarik, namun brilian di satu sisi.

Hal yang membedakan sistim sosialis Tionghoa dengan negara lain seperti Rusia adalah keterbukaan negara cina terhadap dinamika eksternal terutama pada aspek ekonomi, sehingga dapat di katakan bahwa saat ini Tionghoa mempunyai kecenderungan menerima sistim kapitalis di negaranya.

Budaya Politik di Indonesia

Masyarakat Indonesia sangat heterogen. Heterogenitas bangsa Indonesia tidak dalam arti budaya saja melainkan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap budaya politik bangsanya. Bentuk budaya politik Indonesia merupakan subbudaya atau budaya subnasional yang dibawa oleh pelaku-pelaku politik hingga terjadi Interaksi, kerja sama dan persaingan antar-subbudaya politik itu. Interaksi dan pertemuan-pertemuan antar subbudaya itu melatarbelakangi tingkah laku para aktor politik yang terlibat dalam pentas panggung politik nasional.

Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal kemerdekaannya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di

Indonesia karena kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang yang secara khusus adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian, perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang menjadikannya sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.

Menurut Rusadi, budaya politik Indonesia hingga dewasa ini belum banyak mengalami perubahan, pergeseran dan perpindahan yang berarti. Walaupun sistem politiknya sudah beberapa kali mengalami perubahan ditinjau dari pelebagaan formal. Misalnya sistem politik demokrasi liberal ke sistem politik demokrasi terpimpin dan ke sistem politik demokrasi pancasila. Budaya politik yang berlaku dalam sistem perpolitikan Indonesia relatif konstan. Terdapat tipe-tipe budaya politik yang Berkembang di Indonesia. Berikut adalah pembagian tipe-tipe politik yang lebih didasarkan pada gaya berpolitik yang berkembang di Indonesia yaitu:

1. Budaya politik tradisional. Budaya politik tradisional merupakan budaya politik yang memprioritaskan satu budaya dari etnis tertentu. Sebagai contoh, ketika Soeharto memimpin negeri kita selama lebih dari 3 dekade, masyarakat etnis Jawa cukup mendominasi pusat-pusat kekuasaan penting.
2. Budaya politik Islam. Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada keyakinan dan nilai agama Islam. Biasanya kelompok santri memelopori budaya politik ini.
3. Budaya politik modern. Budaya politik modern adalah budaya politik yang lebih bersifat netral tanpa mendasarkan pada budaya atau agama tertentu. Budaya politik ini dikembangkan pada masa pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk stabilitas keamanan dan kemajuan.

Selain itu, ada tiga ciri tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia yaitu: (1) Hirarki yang tegas atau ketat, yaitu adanya pemilihan tegas antara penguasa

dengan rakyat; (2) Kecenderungan *Patronage*, yaitu hubungan antara orang berkuasa dengan rakyat biasa; (3) Kecenderungan Neo-patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia dan jugamasih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia.

Gejala budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai contoh adalah sejak reformasi tahun 1998. Kesadaran politik masyarakat Indonesia meningkat cukup tajam, sebagai contohnya adalah demonstrasi mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau era Orde Baru, demonstrasi tidak diperbolehkan karena dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Tetapi saat ini, demonstrasi tidak dilarang karena merupakan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin.

Ditambah lagi, di masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telah menyebabkan kekuasaan tak terkontrol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya *civil society* terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah: (1) Proyek di pegang pejabat; (2) Promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku (surat sakti); (3) Anak pejabat menjadi pengusaha besar, memanfaatkan kekuasaan orang tuanya dan mendapatkan perlakuan istimewa; dan (4) Anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik.

Di era reformasi sekarang ini sistem politik Indonesia mengalami perkembangan yang cukup bagus dan lebih demokratis dalam melibatkan partisipan dalam berbagai macam kegiatan politik seperti pemilu langsung untuk memilih wakil rakyat.

Dalam pembentukan budaya politik budaya politik nasional, terdapat beberapa unsur yang berpengaruh, yaitu sebagai berikut: (1) unsur subbudaya politik yang berbentuk budaya politik asal; (2) aneka rupa subbudaya politik yang berasal dari luar

lingkungan tempat budaya politik asal itu berada; dan (3) budaya politik nasional itu sendiri.

Lebih jauh lagi pertumbuhan politik nasional dapat dibagi dalam beberapa tahap: (1) Berlakunya politik nasional yang sedang berada dalam proses pembentukannya; (2) budaya politik nasional yang tengah mengalami proses pematangan. Pada tahap ini, budaya politik nasional pada dasarnya sudah ada, akan tetapi masih belum matang; dan (3) budaya politik nasional yang sudah mapan yaitu budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional.

Budaya politik yang berkembang di Indonesia adalah budaya politik campuran, artinya gabungan dari ketiga tipe budaya politik di atas. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa ciri dari masyarakat Indonesia seperti adanya sub-budaya yang beraneka ragam, dan karena Indonesia memiliki budaya sendiri sendiri. Selain itu kecenderungan masyarakat Indonesia yang masih kuat ikatan primordial yang dikenali melalui indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan.

Nazaruddin Syamsuddin menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Jadi simbol yang selama ini telah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhinneka Tunggal Ika.

Penutup

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Dari perbandingan budaya politik di negara maju dan negara berkembang (Amerika Serikat, Tionghoa /China dan Indonesia), ternyata memiliki budaya politik yang khas sebagai ciri dan identitas negara.

Masing-masing negara berupaya bertransformasi menuju politik yang demokratis dengan menggunakan budaya politik yang sudah mengakar di dalam masyarakat, sehingga negara-negara tersebut mencapai apa yang dicita-citakan untuk kepentingan nasional.

Dalam konteks perbandingan ini, Indonesia dapat dikatakan akan mendekati perkembangan budaya politik demokratis Amerika Serikat dan China/ Tiongkok. Indonesia sudah menerapkan pemilu yang demokratis dan sudah menerapkan pemilihan calon presiden melalui konvensi nasional. Dengan demikian, Indonesia dipastikan memiliki budaya politik yang relatif maju dan ingin belajar di setiap tahapan-tahapan menuju negara demokrasi.

Daftar Pustaka

- Gabriel A. Almond dan Sydney Verba, *Budaya Politik*, 2001, Rajawali Press, Jakarta.
- Harjanto, N.T. Budi, 1998, *Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Herbert Victor Wiseman, 1966, *Political Systems: Some Sociological Approaches*, Routledge, London.
- Ichsanul Amal & Budi Winarno, 1998, *Metodologi Ilmu Politik*, UGM, Yogyakarta.
- Jagdish Chandra Johari, 2008, *Comparative Politics, 8th Edition*, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi
- Larry Diamond, 2003, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta
- M.G. Kweit & R.W. Kweit, 1986 *Konsep dan Metode Analisa Politik*, Bina Aksara, Jakarta
- Mary Hawkesworth and Maurice Kogan, 1992 *Encyclopedia of Government and Politics*, Routledge, London
- Michael Rush dan Phillip Althoff, 2003, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali Press, Jakarta
- Ronald H. Chilcote, 1981, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, Westview Press, Colorado.
- Sahat Simamora (Ed), 1983 *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*, Rajawali, Jakarta.
- Jean Blondel and Takashi Inoguchi, 2006, *Political Cultures in Asia and Europe Citizens, states and societal values*, Routledge, Milthon.
- David Birch, Tony Schirato and Sanjay Srivastava, 2001, *Asia : Cultural Politics in the Global Age*, Allen & Unwin, New South Wales Australia.